

## **Menuju Kota Hijau, Melalui Kearifan Lokal (Memberdayakan Potensi Terpendam Tri Kahayangan Di Denpasar Sebagai Hijauan Kota Yang Abadi)**

Syamsul Alam Paturusi<sup>1)</sup>, dan I Wayan Diartika<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Teknik Arsitektur Universitas Udayana, Bali, E-mail: [syamsul\\_alam\\_paturusi@yahoo.fr](mailto:syamsul_alam_paturusi@yahoo.fr)

<sup>2)</sup> Teknik Arsitektur Universitas Udayana, Bali

*Each culture throughout history has shaped its cities not only to meet its physical needs  
but also expressed the beliefs and ideals of its people (John Ormsbee Simonds, 1994)*

### **I. PERKEMBANGAN KOTA DAN DAMPAK IKUTANNYA**

Kebijakan pembangunan di Indonesia berorientasi model pertumbuhan (*growth*) yang juga dianut di berbagai Negara. Fahaman ini berangkat dari teori *Growth Pole* yang dikembangkan oleh François PERROUX<sup>1</sup>, ekonom Perancis, yang kemudian dikembangkan oleh pakar regional lainnya seperti Myrdal dengan teori *Backwash* dan *Spread effectnya*. Inti dari pendekatan-pendekatan ini adalah: penempatan **pertumbuhan** sebagai prioritas pertama; menitik beratkan pada **pembangunan Ekonomi**; dan yang tak kalah pentingnya menitikberatkan **pembangunan di KOTA**<sup>2</sup>. Makalah ini tidak bertujuan memperdebatkan model pendekatan ini, tapi lebih menyoroti dampak praktis yang dirasakan dan terlihat dalam kehidupan sehari-hari di perkotaan di Indonesia.

Akibat langsung dan tidak langsung kebijakan ini, ditandai dengan adanya stagnasi pertumbuhan di daerah rural<sup>3</sup>, kebijakan pembangunan tertuju dan dikonsentrasikan di perkotaan. Perkembangan kota-kota melejit dengan cepatnya baik karena faktor-faktor **internal** (kelahiran-kematian), maupun akibat **eksternal** (perkembangan kegiatan fungsional kota). Akibatnya adalah meningkatnya permintaan **kebutuhan ruang** di perkotaan yang berdampak pada perkembangan hubungan **sosial** dan kegiatan **perekonomian**. Ujungnya adalah perubahan pola tata guna lahan perkotaan, dimana alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian tidak terhindarkan. Ini wajah kota-kota di Indonesia. Di Denpasar misalnya tidak kurang 75 hingga 100 Hektar sawah terancam tergusur<sup>4</sup> beralih ke ruang terbangun.

### **II. POLA PENGGUNAAN LAHAN KOTA: ANTARA NILAI PROFIT DAN NILAI SOSIAL**

Pola penggunaan lahan baru (setelah beralih fungsi) sangat erat kaitannya dengan nilai lahan (*land value*). Semakin kearah pusat kota nilai lahan semakin tinggi dan penggunaan lahannya tentu yang berorientasi pada profit (misalnya mall, pertokoan, dan berbagai sarana komersial lainnya), lahan dianggap sebagai komoditas produksi. Hukum inilah yang mempercepat alih fungsi ruang terbuka kota yang berlokasi di daerah strategis (yang dianggap tidak produktif) dikonversi menjadi fungsi produktif. Nilai lahan yang tinggi di pusat kota memicu pola penggunaan lahan secara intensif yang mendorong terciptanya ruang terbangun berkepadatan tinggi. Itu salah satu sebab, penggunaan lahan yang berorientasi sosial (baca: non profit), seperti ruang terbuka hijau sangat sedikit sekali mendapat perhatian pemerintah kota (tidak menghasilkan PAD?). Di Denpasar misalnya Ruang terbuka hijau yang direncanakan (*planned*) boleh dikatakan stagnan: lapangan Puputan, masih merupakan warisan kolonial; lapangan Renon, dibuat sekitar tahun 80an, berbanding terbalik dengan pertumbuhan kompleks pertokoan, perumahan, fasilitas wisata dan berbagai fasilitas komersial lainnya. Bahkan kecenderungan yang ada, patok jalur hijau yang ada "berjalan dan berpindah", yang kemudian menghilang tergantikan ruang terbangun (*built up area*). Demikian halnya, ruang sempadan di sepanjang bantaran sungai (*tukad*) Badung karena letaknya yang strategis di jantung kota, akibat

<sup>1</sup> "Evaluation of the Growth Center Experience", in James C. Miller, *Regional Development : A Review of the State-of-the-Art*, 1979

<sup>2</sup> Soegijoko Soegijanto, 1997 (catatan: tidak seluruh karakteristik model pertumbuhan ini dipaparkan, hanya dipilih yang ada relevansinya dengan topik bahasan)

<sup>33</sup> Baca: "Rural stagnation" in Angus M. Gunn, *Habitat: Human Settlements in an Urban Age*, 1980

<sup>4</sup> Dinas Pertanian Denpasar, *Radar Bali* Selasa 1 Desember 2009

perbaikan akses, daerah yang dulunya merupakan kantong-kantong kosong (*vacant land*) nyaris tak tersisakan diserbu kaum marginal membentuk permukiman kumuh.

### Terancamnya Jagad Kota

Beberapa tahun terakhir ini, nyaris setiap tahun kita saksikan tragedi bencana di perkotaan: banjir, tanah longsor, peningkatan suhu udara (*urban heat island*), polusi udara, polusi air (*hydrological effects and water pollution*). Radar Bali, edisi 24 November 2009 misalnya memberitakan sumur sumur penduduk di Sesetan terasa asin karena terjadinya intrusi air laut akibat semakin berkurangnya daerah resapan air (Gambar 1).



**Gambar 1. Terjepitnya Daerah Resapan Air Akibat Invasi Permukiman**

Sumber: Radar Bali, 24 November 2005

Ruang Terbuka Hijau (RTH) selain berfungsi estetika, juga sebagai bagian dari ekosistem perkotaan (Soemarwoto, 2008). Punahnya RTH samadengan hilangnya kemanusiaan, karena estetika inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya); Bahkan Jujun S.Suriasumantri, 1985 menyatakan manusia tanpa estetika hanyalah tumpukan daging dan tulang, kemanusiaan tidak lagi mempunyai perasaan. Dalam konteks perkotaan, Ormsbee Simond (1994) menyatakan bahwa manusia secara naluriah mencari suatu harmoni, rindu akan keindahan, tapi akankah hal ini tercapai jika suatu kota gersang kerontang?. RTH sebagai bagian dari ekosistem perkotaan, bila tidak terjaga akan terjadi ketidak seimbangan sistem, inilah yang mengakibatkan berbagai bencana yang melanda kota-kota di Indonesia.

Selain itu RTH memiliki dimensi sosial. Penelitian oleh Setiawan dan kawan-kawan di daerah aliran sungai Code di Yogyakarta (1987) menunjukkan bahwa ruang terbuka yang ada disela-sela permukiman penduduk bantaran sungai tersebut sebagai tempat terjadinya interaksi sosial inter dan antar penduduk<sup>5</sup> Bila dilihat hubungan manusia/lingkungan dalam konteks ekosistem, mengalami pasang surut, dimasa lalu (*pre-industrial city*) hubungan tersebut adalah manusia/LINGKUNGAN, maka saat ini (*modern city*), hubungan tersebut adalah MANUSIA/lingkungan<sup>6</sup>.

### III. UPAYA LEGAL FORMAL

Pemerintah sebenarnya sangat menyadari peran dan pentingnya RTH ini, maka melalui Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengaturnya dalam pasal 28, 29, 30 dan 31. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Undang-undang dan Peraturan ini dalam penjabarannya telah dimasukkan dalam rencana tata ruang di seluruh hirarki perencanaan tata ruang kota-kota di Indonesia. Saat ini yang ditunggu adalah

<sup>5</sup> Telaah Toleransi Penduduk Kampung Kota di Daerah Aliran Sungai Code Berdasarkan Perilaku dalam berhubungan Sosial dan Tetangga, dalam Haryadi dan B.Setiawan, *Arsitektur Lingkungan dan Perilaku*, 1995

<sup>6</sup> "The City as Ecological Unit", in R.Short, John, *Urban Geography*, 1994

implementasinya di lapangan. Semua berharap agar Undang-undang, Peraturan dan Rencana Tata Ruang tidak sekedar menjadi macan kertas, garang di Laporan tapi loyo di pelaksanaan.

#### IV. PERMASALAHAN IMPLEMENTASITATA HIJAU PERKOTAAN

Dari uraian sebelumnya terlihat bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk menciptakan kota yang hijau, yang nyaman dan yang sehat. Baik melalui upaya legal formal maupun dalam bentuk penyuluhan, kampanye dan seminar. Namun, pelanggaran demi pelanggaran penyerobotan dan alih fungsi lahan hijau masih terus belangsung.

Berbagai permasalahan implementasi tata hijau di kota Denpasar :

- Meski suatu kawasan dalam Rencana Tata Ruang direncanakan sebagai daerah jalur hijau namun tidak mudah dieksekusi, karena mayoritas lahan tersebut milik individu. Perangkat intensif dan disintensif bagi lahan yang terkena jalur hijau belum efektif.
- Harga lahan di Denpasar sangat tinggi yang menjadi godaan pemilik untuk melepasnya kemudian menggantikannya dengan lahan yang lebih luas di luar Denpasar.
- Pertambahan anggota keluarga yang membutuhkan lahan untuk permukiman dengan memanfaatkan lahan sawah/ladang milik keluarga besar.
- Rendahnya denda yang ditimpakan bagi pelanggar RTH<sup>7</sup> (Gambar 2)



**Gambar 2. Hanya Didenda Rp.250.000**

Sumber: Radar Bali 4 Desember 2005

#### V. PENDEKATAN ALTERNATIF MENUJU KOTA HIJAU: PEMBERDAYAAN KEARIFAN LOKAL

Segala upaya dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, termasuk untuk menghijaukan kota. Pendekatan yang diusulkan bukan pendekatan yang sifatnya pilihan (*choice*), tapi lebih bermakna **alternatif** yang bertujuan membangun sinergi antar berbagai pendekatan yang telah dilakukan.

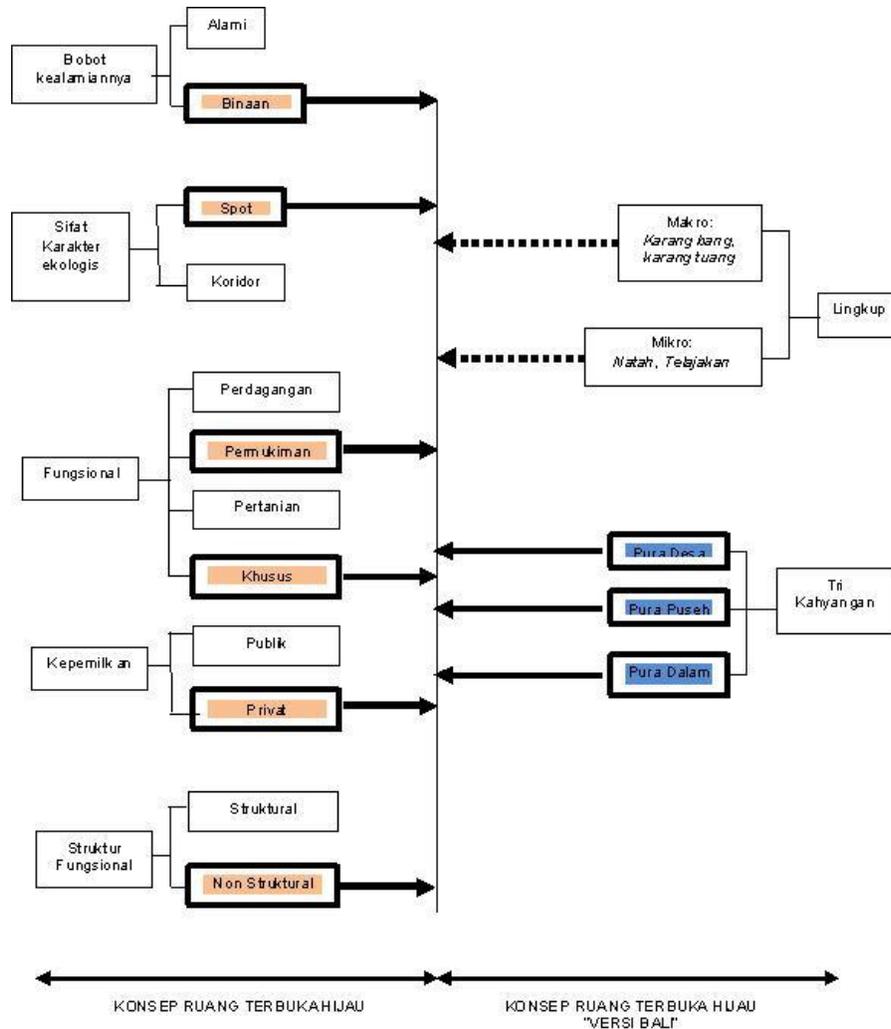
Dasar pendekatan ini adalah:

- Setiap wilayah atau kota di Indonesia memiliki kekhasan atau identitas yang melekat di kota tersebut. Dengan memanfaatkan potensi ini akan diperoleh dua hal, yaitu: tercapainya skenario utama yang diharapkan : Kota yang hijau ; capaian lain yang tak kalah pentingnya adalah terciptanya rancangan kota yang berjati diri, berkarakter ditengah kegamangan perkembangan kota yang semakin kabur arahnya.
- Denpasar atau Bali pada umumnya sudah sangat terkenal di Indonesia bahkan di mancanegara sebagai wilayah yang sangat sarat dengan tradisi budaya yang sangat kuat yang bersumber pada keyakinan dominan masyarakat: Agama Hindu.

<sup>7</sup> Pelanggar RTH kasus rumah joglo di jalan Tukad Balian Dps, hanya dikenai denda Rp.250.000 (Radar Bali, Sabtu 5 Desember 2009).

- Ekspresi budaya ini antara lain terwujud dalam konsep pengaturan tata ruang, baik dalam skala makro (wilayah, perkotaan) maupun dalam skala mikro (permukiman).
- Karena ini adalah milik masyarakat, maka pendekatannya akan lebih mudah dan realistis dibanding dengan pendekatan yang masih asing yang memerlukan berbagai tahapan sosialisasi.

**Pendekatan:**



Pendekatan dilakukan melalui dua arah, yaitu sinkronisasi dua konsep : konsep umum ruang terbuka hijau<sup>8</sup> dan konsep terbuka hijau menurut “versi Bali”. Kedua konsep ini dijaring menurut tingkat relevansi dan kecocokan dari dua belah pihak (Gambar 3).

Misalnya dari klasifikasi ruang terbuka menurut kealamiannya, dijaring ruang terbuka yang sifatnya BINAAN, bukan dalam kategori ruang terbuka alami/liar, kawasan lindung; demikian halnya klasifikasi ruang terbuka berdasarkan sifat karakteristik ekologisnya dijaring ruang terbuka yang sifatnya SPOT/kawasan, bukan koridor, linear dan seterusnya. Dari sisi konsep Bali, ruang terbuka berdasarkan lingkup atau skala cakupannya, teridentifikasi ada dua, skala makro: *karang bengang*,

<sup>8</sup> Diadopsi dari Makalah Lokakarya Pengembangan Sistem RTH di Perkotaan oleh Lab. Perencanaan Lanskap Dep. Arsitektur Lanskap IPB, 2005

*karang tuang*<sup>9</sup> dan dalam skala mikro: *natah*, *tebe* dan *telajakan* (penjelasan rinci mengenai filosofi dan bentuk-bentuknya akan diuraikan pada bagian berikutnya). Kedua macam ruang terbuka ini di Denpasar sudah terinvasi dan nyaris terancam terkonversi keruang terbangun kota. Karenanya dalam makalah singkat ini, kedua macam ruang terbuka ini tidak dibahas secara detail hanya dimasukkan sebagai rekomendasi yang patut diprioritaskan penanganannya.

Fokus utama makalah ruang terbuka hijau berdasarkan konsep Bali difokuskan pada Konsep *Tri Kahayangan* Desa. Intinya adalah setiap Desa (adat) di Denpasar **mutlak** memiliki tiga (*tri*) *kahayangan* (tempat suci) yaitu : pura *Desa*, pura *Puseh* dan pura *dalem*. Ketiga komponen ini sifatnya **abadi** dan **tidak akan mungkin terkonversi** penggunaan lahannya karena ini merupakan inti (*core*) budaya/agama di Bali. Sedangkan ruang terbuka *karang bengang/tuang*, *natah*, *tebe*, dan *telajakan*, masuk dalam kategori *periphery* budaya sehingga rentan modifikasi penggunaan lahannya.

## VI. POTENSI KAHAYANGAN TIGA SEBAGAI RUANG TERBUKA HIJAU ABADI DI PERKOTAAN

Di Denpasar ada 35 desa adat yang berarti ada sekitar 35 *kahayangan tiga*. Setiap komponen *kahayangan* ini memiliki luas lahan yang lumayan besar. Misalnya *pura desa/pura puseh* rata-rata luas ruang terbukanya 0,25 HA<sup>10</sup>, sedang *pura dalem* (kuburan desa) rata-rata luasnya 0,5 HA<sup>11</sup>.

Jumlah desa adat ini tidak akan mungkin berubah, dari luas lahan *kahayangan tiga* ini diperoleh ruang terbuka sekitar 26 HA . Yang menarik adalah, kuburan desa di Denpasar (Bali pada umumnya), lahannya tidak tertutupi perkerasan (tidak ada nisan karena adanya proses kremasi) dan biasanya sangat rimbun (untuk menaungi orang dalam proses kremasi).

Dari segi ekosistem kota, jumlah luasan ruang terbuka ini mungkin masih kurang, namun luasan ini sudah konstant dan permanen. Artinya, tanpa upaya apapun dan darimanapun kondisi minimal luas ruang terbuka hijau di Denpasar masih exist. Layaknya sebagai ruang terbuka hijau kota, bukan hanya tercapainya aspek ekosistem, sosial budaya masyarakat, tetapi juga aspek estetika. Aspek yang terakhir ini nampaknya yang masih butuh sentuhan.

Melihat potensi kearifan lokal ini, kedepan, dapat dikembangkan untuk mengatasi konversi *karang bang/karang tuang* seperti yang telah dilakukan oleh Desa Kesiman Kertalangu Denpasar Timur dengan memberdayakan Subak Padanggalak. Lahan pertanian dikelola dengan sistem tumpang sari. Hasilnya ternyata secara ekonomis cukup menjanjikan untuk hidup sebagai petani kota.<sup>12</sup> Dalam konteks ruang tata hijau di perkotaan, ternyata dengan cara ini dapat meredam konversi lahan ke ruang terbangun.

## VII. KEARIFAN LOKAL BALI YANG RELEVAN DENGAN UPAYA HIJAU KOTA

Bali sebagai salah satu komunitas, ternyata memiliki relatif cukup banyak kearifan lokal yang dalam kekinian layak dipertimbangkan dalam mencari solusi permasalahan suatu wilayah terutama di kawasan perkotaan. Kearifan lokal yang terjadi di Bali tidak terlepas dari keyakinan masyarakat Bali yang sebagian besar penduduknya beragama Hindu, karena Hindu dengan 3 (tiga) kerangka agamanya seperti : Filsafat (*Tatwa*), Upakara/Upacara (*Ritual*) dan Etika (*Susila*) sangat mendasari peri kehidupan masyarakat Bali. Dari segi filsafat masyarakat Bali memiliki filsafat *Tri Hita Karana* yaitu 3 (tiga) sumber sebab tercapainya kebaikan/kebahagiaan hidup melalui hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan (*Ida Sanghyang Widi Wasa*), manusia sesama manusia dan manusia dengan alamnya (Palemahan) (Kaler, 1982:86).

Untuk tercapainya hubungan harmonis tersebut masyarakat Bali mengupayakannya melalui upacara dan upacara *yadnya* yaitu suatu korban suci yang dipersembahkan kepada Tuhan dan semesta alam yang dilakukan secara harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Demikian pula susila/etika sangat berperan terhadap perilaku masyarakat Bali menata tercapainya hubungan harmonis dimaksud. Ketiga hubungan tersebut berjalan seiring dan simultan dalam suatu wilayah tertentu yang disebut desa adat (*pakraman*), karena desa *pakraman* yang ditandai dengan adanya *Parhyangan* (kahayangan tiga), Pawongan yaitu areal permukiman dan warganya yang tinggal pada areal tersebut serta *Palemahan* (*hinterland*) desanya. Desa *Pakraman* di Bali adalah suatu miniatur tempat bermukim warganya (*krama*) yang juga merupakan cikal bakal dari suatu kota yang ada sekarang.

<sup>9</sup> Ruang terbuka sebagai penyangga (*barrier*) sebagai batas antar desa, atau pada daerah kritis.

<sup>10</sup> Ada desa yang memiliki pura desa dan pura puseh, namun ada juga keduanya digabung jadi satu

<sup>11</sup> Kuburan desa di Desa Tegal di jantung kota Denpasar misalnya luasnya sekitar 3 HA.

<sup>12</sup> Radar Bali, Kamis 3 Desember 2009

Terwujudnya kota yang hijau dan nyaman untuk ditinggali, tidak terlepas dari upaya memperlakukan wilayah dan kawasan perkotaan sesuai dengan peraturan perundangan disamping kaidah-kaidah kearifan lokal. Untuk kepentingan mewujudkan harapan di atas maka kearifan lokal terkait yang perlu diangkat mulai dari yang bersifat makro sampai mikro, seperti :

1. *Sad Kertih* : adalah arahan upaya pelestarian alam dan manusia melalui pemujaan terhadap Tuhan untuk menyucikan diri manusia agar terus memiliki komitmen dan konsistensi untuk mewujudkan nilai-nilai *Sad Kertih* dalam kehidupan individual dan kehidupan sosial yang meliputi : Atma Kertih membangun lingkungan rohani/spiritual yang baik; Samudra, Wana dan *Danu Kertih* membangun lingkungan alam yang sejuk; Jagat Kertih membangun lingkungan sosial yang kondusif yang merupakan wadah dalam membangun manusia yang utuh lahir batin (Jana Kertih). (Wiana, 2007:41)
2. *Karang Bengang* atau *Karang Embang* : adalah suatu areal kosong antar dua desa yang berfungsi sebagai selain pemisah kedua desa, juga sebagai jalur hijau yang tidak boleh dibangun sehingga dapat memberi kesejukan.
3. *Tebe* : adalah suatu areal kosong yang merupakan bagian dari suatu pekarangan yang berfungsi servis dari pekarangan rumah tersebut.
4. *Telajakan* : adalah sepenggal/sebagian jalan raya atau jalan kampung yang ada di depan / samping pekarangan rumah, termasuk jalannya sendiri, got beserta senderan dan lain-lainnya (Kaler : 1982:16)
5. Tri Kahyangan Desa : Pura desa, pura puseh dan pura dalem (kuburan desa)

#### VIII. SIMPULAN

Dari interaksi hubungan manusia/lingkungan, dimasa lalu hubungannya adalah manusia/LINGKUNGAN, saat ini MANUSIA/lingkungan. Kedepan, paradigma yang harus diwujudkan adalah kesetaraan MANUSIA/LINGKUNGAN. Dalam konteks perkotaan artinya masyarakat perkotaan boleh dan dapat memanfaatkan seoptimal mungkin potensi lingkungan yang ada dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan kota yang terbatas.

Setiap wilayah atau kota di Indonesia memiliki kekhasan atau identitas yang melekat di kota tersebut. Dengan memanfaatkan potensi ini akan diperoleh dua hal, yaitu: tercapainya skenario utama yang diharapkan : Kota yang hijau ; capaian lain yang tak kalah pentingnya adalah terciptanya rancangan kota yang berjati diri, berkarakter ditengah kegamangan perkembangan kota yang semakin kabur arahnya.

Kontribusi ruang terbuka hijau dari kearifan lokal di Denpasar cukup signifikan di tengah maraknya alih fungsi lahan ke ruang terbangun. Untuk menuju kota hijau yang diidam-idamkan, tumpuan harapan pada kearifan lokal saja, tentu tidak akan tercapai. Dibutuhkan komponen lain seperti pemerintah, swasta, pariwisata dan pihak-pihak lainnya untuk bersama-sama bersinergi untuk mewujudkan Denpasar yang hijau.

Untuk mengoptimalkan peran Kahayangan tiga (*tri kahyangan*) dalam hijauan kota – selain fungsi utama ibadah- sentuhan estetika melalui perencanaan dan perancangan vegetasi, *hard and soft landscape*, yang tentunya berdasarkan nilai- nilai lokal, misalnya melalui perlombaan antar desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Haryadi, B.Setiawan, (1995). *Arsitektur Lingkungan dan Perilaku*, Jakarta: Depdiknas
- [2] Lab. Perencanaan Lanskap Dep. Arsitektur Lanskap IPB, (2005). *Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Perkotaan*, Makalah Lokakarya Dep. PU
- [3] M.Gunn, Angus, (1978). *Habitat: Human Settlement in an Urban Age*, Canada: British Columbia
- [4] Ormsbee Simonds, John (1994). *Garden Cities 21*, New York: McGraw Hill

- [5] Soemarwoto, Otto, (2008). *Analisis dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada Univ.Press
- [6] Raka Dalem, AAG, dkk.,(2007). *Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Denpasar: Univ. Udayana
- [7] R.Short, John, (1984). *An Introduction to Urban Geography*, , London: Routledge&Kegan Paul
- [8] Shirvani, Hamid, (1985). *Urban Design Process*, , New York: Van Nostrand Reinhold
- [9] Tjahjati, Budhy, Kusbiantoro, (1997), *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia: Mengenang Prof.Dr. Sugijanto Soegijoko*, Jakarta: Gramedia
- [10] "Air Laut Merembes di Sesetan", *Radar Bali*, 24 November 2005
- [11] « Ratusan Hektar Sawah Digusur Bangunan » *Radar Bali*, 1 Desember 2005
- [12] "Subak Dinilai Bisa Amankan Jalur Hijau", *Radar Bali*, 3 Desember 2005
- [13] "Hari ini Rumah Joglo Ditipirinkan", *Radar Bali*, 4 Desember 2005